

BAB II

KEDEKATAN AS-ISRAEL DAN UPAYA AS TERHADAP PERDAMAIAN KONFLIK AS-ISRAEL

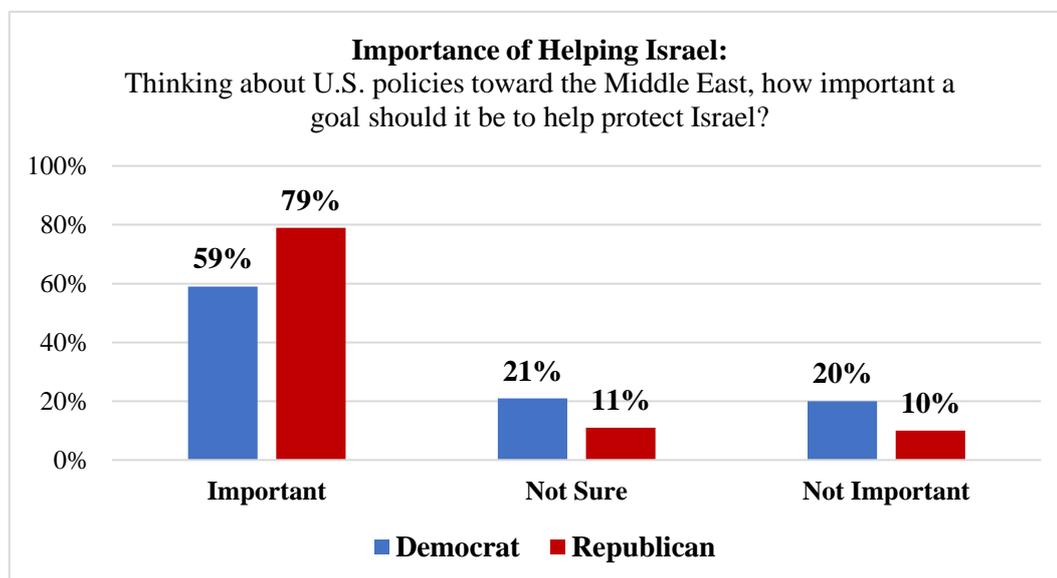
Sebelum membahas sajian utama mengenai bagaimana pengaruh kelompok Evangelis atas kebijakan luar negeri AS terhadap Israel masa pemerintahan Trump, pada bab ini penulis bertujuan untuk mengkaji beberapa pembahasan mengenai ulasan-ulasan yang membuktikan bahwa AS dan Israel merupakan dua entitas negara yang memiliki hubungan spesial. Hubungan spesial tersebut terlihat dari latar belakang kedua negara yang dapat dilihat dari kacamata aspek geopolitik, opini publik, dan pengaruh kelompok lobi yang bermain di lingkup domestik AS. Lebih lanjut, AS memiliki kepentingan mendamaikan konflik Palestina-Israel. Sebelum masa pemerintahan Trump, terdapat enam kali pertemuan diplomatik antara pihak Israel-Palestina dalam rangka mencapai kesepakatan perdamaian yang diinisiasi oleh AS.

Selain mengkaji ulasan terhadap pembuktian kedekatan AS-Israel dan upaya AS mendamaikan konflik Palestina-Israel, bab ini juga membahas mengenai profil kelompok Evangelis secara parsial. Dalam konteks tersebut, penulis membahas mengenai relasi hubungan kelompok Evangelis terhadap dinamika perpolitikan domestik AS. Terakhir, penulis menjabarkan beberapa kebijakan perdamaian yang diteken oleh AS era pemerintahan Trump yang pada dasarnya merupakan kebijakan pro-Israel yang terdiri atas *deal of the century* dan *abraham accord*.

2.1. Latar Belakang Kedekatan Hubungan AS-Israel

Dalam budaya demokrasi bipartisan, sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua partai yang bertanding dalam kontestasi pemilihan Presiden akan selalu menyajikan gagasan yang saling bertentangan berdasarkan prinsip partainya masing-masing. Perbedaan pandangan tersebut berangkat dari mahzab ideologi yang diusung oleh kedua kubu partai. Kubu Demokrat mengusung Liberalisme sebagai dasar prinsip terhadap keberlangsungan pemerintahan negara, sedangkan kubu Republikan mengadopsi Konservatisme (Fadillah & Ferdianti, 2020).

Tabel 2. 1. Jajak pendapat antar partai Demokrat dan Republik dalam menanggapi diskursus Israel



Sumber: Frankovic, 2021 “telah diolah kembali”

Namun dibalik hiruk-pikuk dinamika perspektif layaknya khas negara yang mengadopsi demokrasi sebagai suatu sistem, terdapat satu isu dimana kubu Demokrat dan kubu Republikan berada di frekuensi irisan yang sama, yakni gagasan mengenai keberpihakannya terhadap Israel. Artinya, kedua kubu sepakat

bahwa isu Israel merupakan kepentingan fundamental bagi kebijakan luar negeri AS di regional Timur Tengah. Hal ini diperkuat dari jajak pendapat yang dirilis oleh media *think tank* asal AS, *YouGovAmerica* sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 2.1 menyatakan 59% kubu Demokrat dan 79% kubu Republikan sepakat bahwa pemerintahan Amerika harus mengakomodir Israel (Frankovic, 2021).

Jika melihat rekam jejak dari seluruh era kepresidenan AS dari zaman pemerintahan Woodrow Wilson (Presiden AS ke-28) hingga Donald Trump (Presiden AS ke-45), dapat terlihat ikatan yang kuat dengan Israel dalam hal sejarah, perdagangan bilateral, dan aliansi strategis. Wujud keberpihakan pemerintahan AS terhadap Israel dibuktikan dengan: Menyuplai miliaran dolar per tahun dengan wujud *foreign aid*; Mendukung agresi militer Israel secara terbuka terhadap pihak yang dianggap musuh; Secara konsisten mem-veto resolusi DK-PBB yang merugikan Israel (Beauchamp, 2014a). Berangkat dari hal tersebut, bagian ini akan menjelaskan latar belakang yang menyebabkan kedekatan kedua negara yang dianalisis dari faktor aspek geopolitik, opini publik, dan lobi Israel.

2.1.1. Aspek Geopolitik

Secara letak geografis, AS dan Israel memiliki letak jarak yang sangat berjauhan, sekitar 9000 Kilometer dari arah Timur Washington D.C. Namun kedekatan kedua negara tersebut telah terbentuk dari tahun 1917 hingga dewasa ini. Salah satu aspek yang dapat dikaji adalah melalui pendekatan geopolitik. Pada dasarnya, aspek geopolitik merupakan sebuah studi pendekatan politik internasional yang secara langsung berhubungan dengan unsur geografis, sejarah, dan budaya (Granieri, 2015). Dengan kata lain, aspek geopolitik menyatakan bahwa

segala sesuatu yang terjadi di fenomena politik internasional tidak dapat terlepas dari faktor-faktor geografis, sejarah, dan budaya. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan latar belakang hubungan AS-Israel dengan aspek geopolitik berdasarkan pembagian rentang waktu: Pra-Perang Dingin; Perang Dingin; Pasca Perang Dingin.

2.1.1.1. Pra-Perang Dingin

Maraknya sentimen anti-semitisme kepada diaspora Yahudi di tanah Eropa menyebabkan masifnya keinginan mereka untuk meninggalkan benua biru tersebut. Selain untuk menghindari sentimen anti-semitisme, motivasi diaspora Yahudi bermigrasi adalah untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan terpengaruh gerakan Zionisme (Neuman, 1999). Secara singkat, Zionisme merupakan sebuah gerakan politik-nasionalisme yang bertujuan agar masyarakat Yahudi dapat memiliki negaranya sendiri di wilayah Palestina (TRT World, 2017).

Hubungan AS-Israel mulai terjalin pada saat kalangan Zionis masih memperjuangkan pembentukan resmi negara yang ditujukan untuk kalangan Yahudi tersebut. Dengan kata lain, AS memulai hubungan dengan Israel sebelum sah menjadi entitas negara seutuhnya. Bukti konkretnya adalah dukungan moriil AS era kepresidenan Woodrow Wilson atas substansi deklarasi Balfour pada tahun 1917 (Gomberg, 2013).

Deklarasi Balfour

“Dengan rasa senang saya menyampaikan pada Anda, atas nama Pemerintah Kerajaan Inggris, deklarasi yang didasarkan pada simpati untuk aspirasi Zionis Yahudi ini telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet Perang. Pemerintah Kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina, dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dimiliki oleh Yahudi di negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia.” (Hadi, 2021)

Asal-muasal dari penamaan ‘Deklarasi Balfour’ diambil dari nama Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour – deklarasi tersebut ditujukan kepada Rothschild (Pemimpin Kelompok Zionis di Inggris) sebagai jaminan restu pembangunan tanah air Yahudi. Dengan kata lain, deklarasi tersebut merupakan bentuk dukungan Kerajaan Inggris terhadap pendirian tanah air nasional bagi masyarakat Yahudi di salah satu wilayah kolonial Inggris, Palestina. Dukungan moril Wilson terhadap substansi deklarasi Balfour berubah menjadi sikap resmi pemerintahan AS terhadap kalangan Zionis setelah Kongres mengesahkan resolusi bernama “*The Establishment in Palestine of a National Home for the Jewish People*” pada tahun 1922.

Dukungan moriil Wilson terhadap deklarasi Balfour dinilai bertentangan dengan gagasan 14 butir perdamaian yang diusungnya, lantaran merusak hak masyarakat Arab-Palestina untuk mendulang nasibnya sendiri. Namun dikarenakan kedekatan Wilson dengan Lobi Zionis asal AS, Louis D. Brandeis, maka dukungan tersebut tetap dijalankan. Setelah era Wilson, dukungan AS terhadap kelompok Zionis kian terus terjadi hingga merdekanya Israel diatas mandat wilayah Yahudi berdasarkan resolusi PBB no. 181 atau yang kerap dikenal sebagai '*UN Partition Plan 1947*' (Athallah Al Sarhan, 2017).

2.1.1.2. Perang Dingin

Dibawah Kepresidenan Harry S. Truman (Presiden AS ke-33), AS termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel pasca David Ben-Gurion (Perdana Menteri Israel ke-1) memproklamirkan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Sejak saat itu, Israel menjadi suatu negara yang memiliki 'hubungan spesial' dengan AS. Dasar dukungan pemerintahan AS kepada Israel adalah karena keduanya secara bersamaan mengadopsi budaya demokrasi, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, dan menerapkan gagasan *equality before the law* (Fraiman, 2021).

Israel merupakan negara yang mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi diantara mayoritas tetangga Arabnya yang kerap memberlakukan rezim otoriter. Pada saat Uni Soviet berusaha melebarkan sayap pengaruh komunisme ke beberapa negara Timur Tengah, AS bekerjasama dengan Israel guna menumpas pengaruh komunisme melalui pertukaran informasi intelejen. Bagi AS, Timur Tengah merupakan ladang yang berharga bagi kepentingan nasional dan kebijakan luar

negerinya. Hal ini karena regional tersebut turut menyimpan komoditas cadangan minyak yang melimpah bagi kebutuhan domestik AS, terutama di negara-negara yang berada di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu, AS akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi sumber komoditasnya dari segala jenis ancaman yang muncul, dari kemungkinan yang menyebabkan instabilitas politik hingga pengaruh komunisme Uni Soviet (Gholz, 2018).

Hubungan AS dan Israel tidak selalu harmonis, adakalanya kedua negara kerap berjalan di arena yang berbeda antara satu sama lainnya. Hubungan yang kurang baik antara negara-negara Arab terhadap Israel merupakan pemicu utama yang menyebabkan Israel dan AS kerap beriringan tidak senada. Hal ini dikarenakan AS harus menjaga kiprah hubungan baiknya dengan negara-negara Arab dan kepada Israel di saat waktu yang bersamaan. Namun dalam konteks perang dingin, Israel mendapatkan hak istimewa sejak ditekennya kontrak kerjasama militer antara AS-Israel dengan nama QME (*Qualitative Military Edge*). Inti dari kerjasama tersebut adalah komitmen AS untuk menyuplai kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang paling mutakhir kepada Israel sebagai unit pertahanan diri dari musuh Arab dan media bersaing dengan Uni Soviet.

2.1.1.3. Pasca Perang Dingin

Sejak perang dingin berakhir yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet dibawah pemerintahan Mikhail Gorbachev (Presiden Uni Soviet ke-8), hal ini juga menandakan bahwa fokus AS-Israel berubah di regional Timur Tengah. Bilamana sebelumnya berhubungan dengan kerjasama guna meminimalisir pengaruh

komunisme Uni Soviet menyebar di negara-negara Timur Tengah, namun pasca perang dingin, fokus kedua negara bergeser terhadap sumber ancaman yang sama yakni mengenai persoalan terorisme (Keener, 2020).

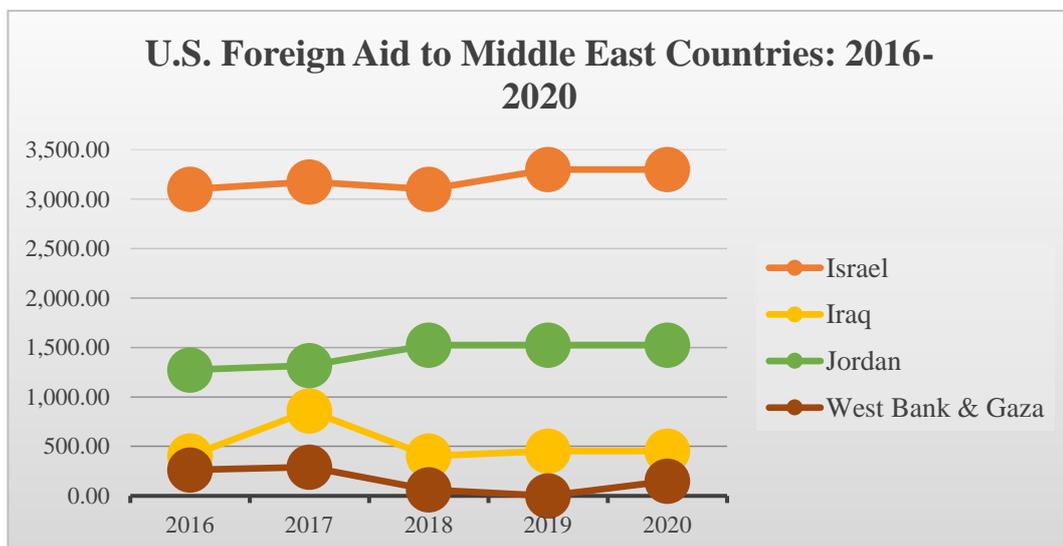
Sebelas September 2001 merupakan salah satu hari paling tragis dalam sejarah peradaban Amerika, peristiwa tersebut kerap dikenal sebagai peristiwa '9/11'. Terdapat setidaknya empat pesawat yang dibajak oleh sekelompok orang yang terjaring dalam kelompok terorisme, mereka melakukan serangan teror di wilayah Amerika – Dua pesawat ditabrakan di *World Trade Center*; Satu pesawat terjatuh ke lapangan Shanksville; dan Satu pesawat menabrakan diri ke Pentagon. Kejadian tragis tersebut memakan korban jiwa lebih dari 2.900 individu (Waterfield, 2020). Peristiwa 9/11 merupakan sebuah tamparan keras bagi AS sejak kealahannya atas perang Vietnam. Dibawah komando George Walker Bush (Presiden AS ke-43), AS berusaha menumpas gerakan Terorisme hingga ke akar-akarnya dengan memaksimalkan segala sumber daya (VOA, 2009). Dihadapan kongres melalui pidatonya yang terkenal pada 21 September 2001, Bush menyatakan:

"....Seluruh negara memiliki hak untuk membuat keputusan. Entah anda bersama kami, atau Anda bersama teroris..."

Penggalan kalimat pidato Bush tersebut diartikan sebagai ajakan kepada komunitas internasional untuk berkontribusi langsung atas perlawanan terhadap terorisme. Lebih lanjut, Bush tidak mentolerir adanya ruang netralitas bagi pihak negara yang abstain dalam melancarkan agendanya yang dikenal sebagai GWOT

(*Global War On Terror*) (CNN, 2001). Dalam konteks pemberantasan terorisme, Israel merupakan salah satu mitra utama AS dalam menyukseskan agenda GWOT. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman sukses Israel dalam menghadapi serangan teror yang dilancarkan oleh faksi-faksi Arab. Bentuk konkretnya, AS membutuhkan pertukaran informasi intelejen, aktivitas anti-terorisme, dan perlindungan siber dari pihak Israel agar terus bisa memantau perkembangan informasi terkini mengenai pergerakan teroris di regional Timur Tengah – sebagai timbal baliknya, Israel memerlukan suku cadang amunisi dan senjata terbaik dari AS.

Tabel 2. 2. Perbandingan sasaran negara penerima *US Foreign Aids* (dalam jutaan dolar)

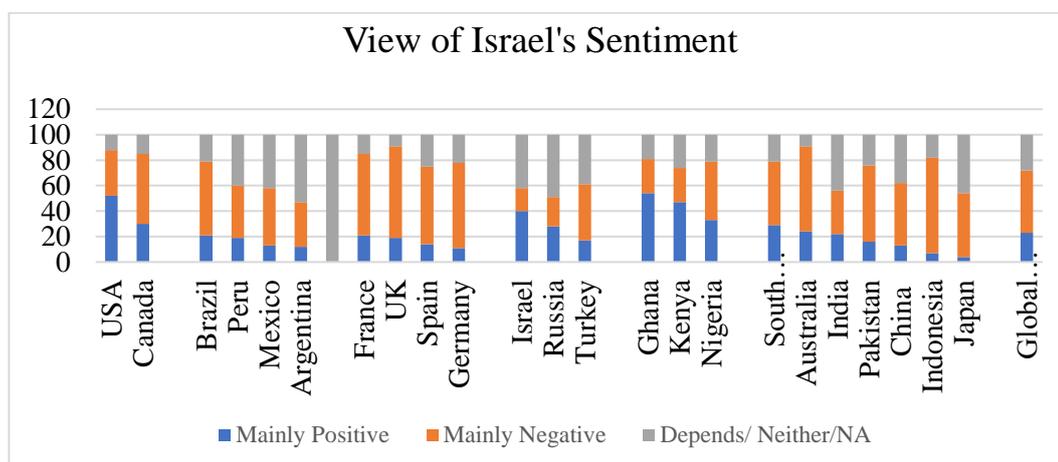


Sumber: Sharp, 2020 “telah diolah kembali”

AS memiliki suatu program anggaran khusus bernama bantuan luar negeri (*foreign aid*), jumlahnya dicanangkan kurang dari 1% dari total keseluruhan rancangan anggaran belanja pemerintah. Pada dasarnya, pengadaan bantuan luar negeri ditujukan guna mendukung kepentingan bersama antara AS dan entitas pemerintah atau komunitas di negara penerima dengan sasaran pada bidang humanitarian, pembangunan ekonomi, dan militer (Ingram, 2019). Sebagai wujud aliansi strategis yang solid, Israel menerima dana bantuan luar negeri sekitar AS\$ 3.8 Miliar pada tahun 2020 – yang mana sebagian besar dialokasikan untuk keperluan militer (Horton, 2021). Berdasarkan keterangan Tabel 2.2, sebagai pembandingan pada periode 2016-2020, Israel menerima dana bantuan luar negeri secara konsisten di angka AS\$ 3 Miliar dibanding negara penerima lainnya.

2.1.2. Opini Publik

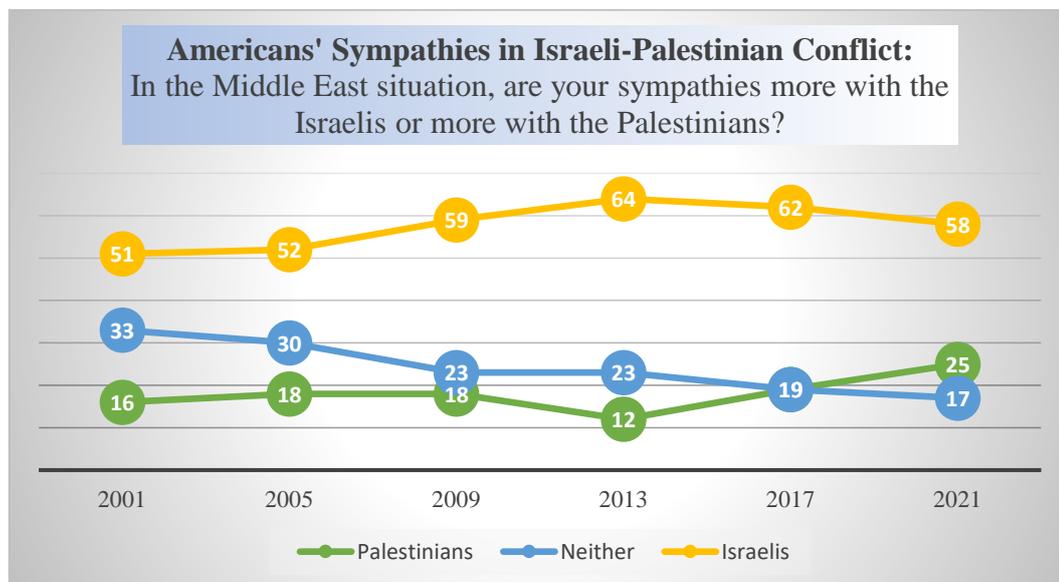
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.3, survey BBC World Service 2014 merilis sebuah jajak pendapat yang membahas mengenai opini publik internasional terhadap negara Israel. Sebagai konteks, BBC melakukan survei di 5 benua yang turut melibatkan 22 negara – opsi pertanyaan yang diajukan adalah: “pandangan positif”; “pandangan negatif”; dan “netral/tidak tahu/tergantung” terhadap negara Israel. Hasil survei mengungkapkan bahwa mayoritas publik internasional memiliki sentiment negatif terhadap Israel, terutama bagi negara-negara yang berlokasi di regional Eropa, Amerika Selatan, dan Asia (Beauchamp, 2014b).

Tabel 2. 3 Data opini publik internasional terhadap negara Israel

Sumber: Beauchamp, 2014b “telah diolah kembali”

Walaupun menyandang stigma negatif terhadap opini publik internasional, mayoritas publik AS mendukung Israel. Berdasarkan data diatas, dukungan opini publik AS menunjukkan 52% sentiment positif terhadap Israel. Hal ini senada dengan survei-survei yang dirilis oleh media lainnya. Pada tahun 2019, Gallup merilis data bahwa 59% masyarakat Amerika lebih bersimpati kepada Israel di tengah konflik Palestina-Israel. Bilamana dikaitkan dengan dukungan publik Amerika terhadap Israel yang terlampir pada tabel 2.4, rata-rata survey menunjukkan konsisten pada angka diatas 50% dihitung sejak tahun 2001 (Saad, 2021).

Jika dielaborasikan terhadap konteks opini publik Amerika atas isu Israel dengan politik, maka mendukung Israel merupakan suatu cara guna mendulang suara dalam pemilu. Hal itulah yang menyebabkan kubu Republikan dan kubu Demokrat cenderung berada di irisan frekuensi yang sama apabila berbicara soal isu Israel (Sisca, 2021b). Dengan kata lain, mayoritas kandidat Presiden akan selalu menunjukkan keberpihakan dan dukungannya terhadap Israel guna meraih simpati masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitasnya.

Tabel 2. 4 Dukungan masyarakat Amerika terhadap Israel

Sumber: Saad, 2021 “telah diolah kembali”.

2.1.3. Lobi Israel

Sejak Israel menjadi sebuah negara yang berdaulat pada 14 Mei 1948, AS telah mengalokasikan dana foreign aid sebesar AS\$236 Miliar hingga tahun 2020 kepada Israel – yang mana sebagian besar digunakan untuk keperluan pertahanan militer (Gani et al., 2021). Berdasarkan tabel 2.3, lembaga survey Gallup merilis bahwa angka dukungan publik Amerika terhadap Israel selalu konsisten berada di atas 50% sejak dekade 2000an. Namun selain itu, hubungan spesial antara Israel-AS tidak terlepas dari masifnya kinerja pihak lobi dalam kancah perpolitikan domestik AS.

Pada dasarnya, Lobi didefinisikan sebagai sebuah hak masyarakat untuk mengimplementasikan aspek kebebasan berbicara guna mempengaruhi keputusan kongres terhadap suatu produk kebijakan negara (NCSL, 2014). Pendek kata, Lobi memainkan peran penting terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah. Praktik Lobi merupakan wujud dari aplikasi amandemen pertama konstitusi AS yang diatur lebih lanjut oleh *Lobbying Disclosure Act of 1995*.

Para entitas Pelobi yang melakukan aktivitas lobi kerap kali berasal dari satuan profesional, firma, serikat, dan kelompok kepentingan yang telah resmi terdaftar oleh pemerintah. Pada tahun 2020, terdapat setidaknya 11.533 entitas pelobi yang resmi di Amerika (Duffin, 2022). Dalam konteks memperjuangkan kepentingan Israel bagi pemerintahan AS, jumlah pelobi pro-Israel sekitar 29 entitas yang berasal dari berbagai kalangan (Waxman, 2010).

2.2. Kontribusi Pemerintahan AS dalam berupaya mendamaikan konflik Palestina-Israel sebelum masa Pemerintahan Donald Trump

Selama puluhan tahun, bangsa Arab-Palestina berkonflik dengan bangsa Yahudi-Israel yang disebabkan oleh klaim kepemilikan wilayah yang sama. Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik yang berlangsung paling lama dan penuh kekerasan di tengah zaman modern pasca Perang Dunia II, sehingga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dunia. Fakta lapangan menyatakan bahwa bangsa Palestina harus hidup tanpa kejelasan dibawah situasi pendudukan militer Israel di wilayahnya. Oleh karena itu, konflik Palestina-Israel telah menjadi titik awal ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, terutama sejak di deklarasikannya kemerdekaan Israel pada tahun 1948 yang disambut berbagai peristiwa peperangan.

Pasca memenangkan perang dingin atas Uni Soviet pada tahun 1991, AS adalah satu-satunya negara adidaya di dunia. Stabilitas keamanan geo-politik kawasan Timur Tengah menjadi salah satu kepentingan nasional terbesar negeri dengan julukan Paman Sam tersebut. Untuk lebih menegaskan pengaruhnya, AS memutuskan untuk bertindak sebagai juru damai antara Israel dan Palestina (termasuk tetangga Arab yang berkonflik dengan Israel).

Walaupun pemerintahan AS memiliki kedekatan terhadap Israel, akan tetapi di lain sisi, AS juga turut berkontribusi atas upaya perdamaian konflik antara Israel-Palestina (United States Department of State, 2021). Setidaknya terdapat beberapa kali upaya konflik yang dilakukan oleh pemerintahan AS di tengah konflik Palestina-Israel. Merujuk pada data TRT World, setidaknya terdapat beberapa momen-momen kunci negosiasi perdamaian konflik Palestina-Israel yang mana AS turut terlibat, yakni: Oslo I (1993) & Taba/Oslo II (1995): Camp David Summit/ KTT Camp David (2000); Quartet's Roadmap for Peace (2003); Annapolis (2007); Obama-led peace talks (2009-2013) (TRT World, 2019).

2.2.1. Oslo I (1993) & Taba/Oslo II (1995)

Kesepakatan Oslo merupakan salah satu kesepakatan perdamaian konflik bersejarah antara Palestina-Israel yang diinisiasi sekaligus difasilitasi secara tertutup oleh seorang diplomat berkewarganegaraan Norwegia, Mona Juul (J.t Rogers, 2016). Sesuai namanya, proses negosiasi perdamaian konflik yang dilaksanakan oleh delegasi Palestina dan delegasi Israel berlokasi di suatu tempat rahasia di kota Oslo pada Desember 1992. Pertemuan antara kedua delegasi bertujuan untuk membahas titik temu terhadap sejumlah isu yang meliputi:

penempatan perbatasan wilayah, pendirian otoritas pemerintahan, dan mengkonkretkan upaya perdamaian (History, 2018).



Gambar 2. 1 Rabin dan Arafat berjabat setelah Israel dan PLO pasca menandatangani perjanjian Oslo

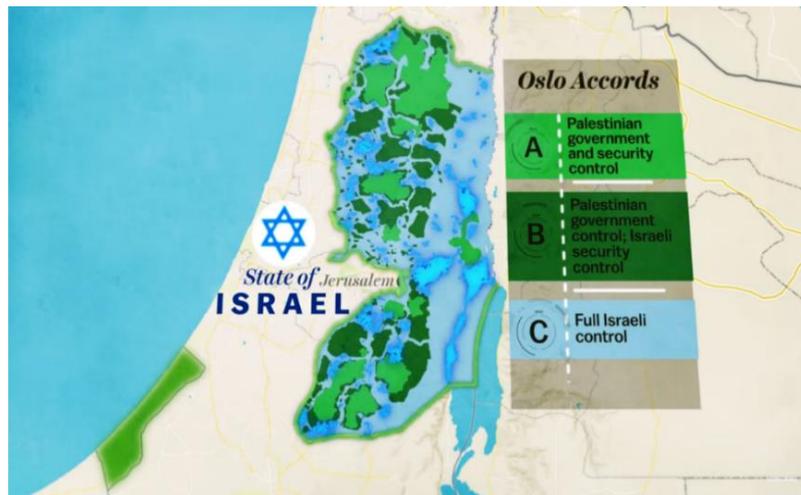
Sumber: CNN Editorial Research, (2021).

Hasil negoisasi yang alot antar kedua delegasi di Oslo selama berbulan-bulan turut melahirkan suatu kesepakatan Oslo I yang ditandatangani oleh pihak PLO, Israel, AS, dan Rusia di Washington DC pada September 1993. Adapun sejumlah pokok-pokok penting terhadap substansi kesepakatan Oslo I bagi keberlanjutan harapan perdamaian konflik Palestina-Israel yang meliputi:

- i. Israel mengakui PLO sebagai satu-satunya representatif resmi dari pihak Palestina
- ii. PLO mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara
- iii. Pembentukan Otoritas Palestina (selanjutnya akan disebut sebagai PA) yang ditujukan untuk mengelola pemerintahan di wilayah Tepi Barat dan Gaza

Pada tahun 1995, Palestina dan Israel menyepakati perjanjian kesepakatan Taba (selanjutnya akan disebut sebagai kesepakatan Oslo II). Kesepakatan Oslo II diratifikasi oleh pihak Palestina dan pihak Israel di Washington DC pada 28 September 1995. Dalam kesepakatan Oslo II, delegasi Palestina (PLO) dan delegasi Israel turut menyepakati sejumlah poin penting yang terdiri atas (History, 2018; Mamad et al., 2021; Sisca, 2021a):

- i. Penarikan mundur tentara Israel dari dua wilayah besar Palestina, yakni Kota Jericho dan Jalur Gaza.
- ii. Pembagian teritorial Tepi Barat Palestina yang terdiri dari 3 kategori wilayah, yang meliputi;
 - a. Kategori wilayah A, kehidupan bermasyarakat sipil dan keamanan diatur oleh PA sepenuhnya. Dengan kata lain, 40% wilayah Tepi Barat Palestina berada pada kedaulatan Palestina
 - b. Kategori wilayah B, kehidupan bermasyarakat sipil diatur oleh PA dan unsur keamanan diatur oleh pemerintah Israel
 - c. Kategori wilayah C, wilayah yang sepenuhnya milik otoritas pemerintahan Israel baik secara sipil maupun keamanan
- iii. Diizinkan penyelenggaraan Pemilu di Palestina
- iv. Menetapkan parameter untuk kerja sama politik dan ekonomi antara pihak Israel dan Palestina di wilayah kependudukan Tepi Barat.
- v. Israel diizinkan untuk mengawasi segala jenis peredaran barang dan jasa yang memasuki kawasan Jalur Gaza dan Tepi Barat

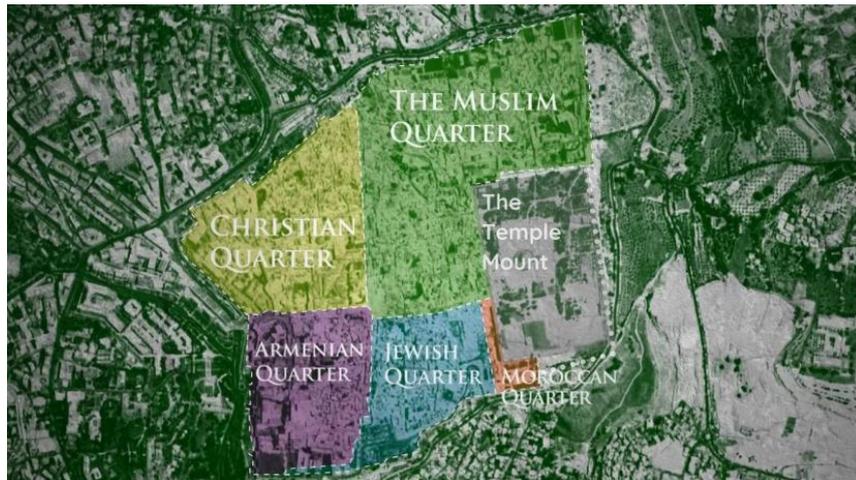


Gambar 2. 2 Pembagian wilayah Tepi Barat Palestina berdasarkan Kesepakatan Oslo II 1995. Pembagian wilayah diklasifikasikan menjadi tiga kategori: Kategori A (warna hijau muda); Kategori B (warna hijau tua); Kategori C (warna biru muda)

Sumber: Harris, (2016)

2.2.2. Camp David Summit/KTT Camp David (2000)

Bertepatan pada 11 Juli 2000, AS menginisiasi pertemuan antar delegasi Palestina-Israel melalui rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlokasi di Camp David, sekitar 100 km dari Gedung Putih, Washington DC. Konferensi tersebut kerap dikenal sebagai ‘KTT Camp David 2000’ yang ditujukan guna menindaklanjuti pembahasan isu-isu mendasar seperti perbatasan, pengungsi Palestina, sumber air, dan permukiman Yahudi. Namun pembahasan utamanya berfokus pada isu Yerusalem (Asri, 2003; Shofiah, 2018).



Gambar 2. 3 Ragam Distrik di Yerusalem, yang meliputi: Distrik Kristen (warna kuning); Distrik Muslim (warna hijau); Distrik Armenia (warna ungu); Distrik Yahudi (warna biru); Distrik Maroko (warna merah); dan *The Temple Mount* (warna abu-abu)

Sumber: TRT World, (2017)

Berperan sebagai juru runding, AS merilis proposal yang ditawarkan kepada kedua negara terkait status masa depan Yerusalem. Poin-poin penting yang ditawarkan AS yakni (Shofiah, 2018):

- i. Palestina memiliki kedaulatan penuh atas Distrik Muslim di kawasan *Old City* (selanjutnya akan disebut sebagai kawasan Kota Lama), Kota Yerusalem
- ii. Israel memiliki kedaulatan penuh atas Distrik Yahudi dan Distrik Armenia di kawasan Kota Lama, Kota Yerusalem
- iii. Kawasan distrik *The Temple Mount* sepenuhnya dibawah kedaulatan Israel

Pihak Israel mengusulkan substansi proposal yang berbeda dengan pihak AS dalam mengupayakan perdamaian, serangkaian proposal tersebut menawarkan (Shofiah, 2018; The Irish Times, 2001):

- i. Menyerahkan kedaulatan penuh terhadap Distrik Kristen dan Distrik Muslim kepada Palestina
- ii. Menyerahkan kedaulatan sebagian besar pinggiran kota Yerusalem Timur kepada Palestina
- iii. Memberikan izin kepada Palestina sebagai pihak yang memelihara kawasan *The Temple Mount*
- iv. Israel mempertahankan kedaulatan atas "Yerusalem Raya" sebagai bagian dari wilayah negaranya
- v. Israel akan mempertahankan kendali atas sumber air dan wilayah udara wilayah Palestina.

Dikarenakan tidak bertemunya jalan tengah antara Palestina-Israel dalam menindaklanjuti pembahasan isu-isu mendasar antar keduanya, maka KTT Camp David 2000 yang resmi berakhir pada tanggal 25 Juli 2000 berakhir tanpa kesepakatan atau kondisi *deadlock*. Faktor utama dari adanya kegagalan kesepakatan adalah karena tidak adanya faktor kompromi antar keduanya atas substansi proposal perdamaian yang diajukan. Dampak kegagalan KTT Camp David 2000 mengakibatkan eskalasi konflik memanas antara kubu Palestina dan kubu Israel, yakni terjadinya Intifada II.

2.2.3. Quartet's Roadmap for Peace (2003)

Roadmap for Peace (nama resmi: *A Performance-based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict*) / Peta Jalan Perdamaian merupakan proposal terkait langkah-langkah konkret perdamaian konflik Palestina-Israel yang dibuat pada Juni 2002. Proposal perdamaian tersebut diajukan oleh pemerintahan AS era Presiden George Walker Bush, yang dikembangkan lebih lanjut bersama PBB, Uni Eropa (selanjutnya akan disingkat UE), dan Rusia – keempat entitas tersebut dikenal dengan kelompok Kuartet. Selama menyusun proposal, Kuartet juga melibatkan perwakilan dari Israel, Palestina, dan pihak-pihak lain dari negara Timur Tengah secara tidak langsung.

Pada dasarnya, proposal Peta Jalan Perdamaian bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara komprehensif yang berbasis pada konsep solusi dua negara (Bureau of Public Affairs, 2003). Guna mencapai tujuan, proposal Peta Jalan Perdamaian yang disusun oleh Kuartet menggagas misi meliputi (“The Road Map,” 2003): Mengakhiri kekerasan; Menghentikan kegiatan pemukiman; Mereformasi institusi Palestina; Menerima kehidupan bernegara Israel; Mendirikan negara Palestina yang berdaulat; dan Mencapai perdamaian konflik Palestina-Israel pada tahun 2005. Lebih lanjut, proposal perdamaian tersebut juga telah merencanakan tiga fase yang harus dijalani oleh pihak Palestina dan pihak Israel agar tercapainya perdamaian konflik yang abadi pada tahun 2005.

Proposal perdamaian Kuartet yang diprakarsai oleh AS menimbulkan dua reaksi yang berbeda terhadap kubu yang sedang berkonflik. Israel keberatan dengan isi proposal sedangkan Palestina menerima. Dikarenakan tidak bertemu titik antar kedua kubu, proposal ini tidak berjalan sesuai rencana dan bersifat ‘mati’ (Dickson & Walker, 2021).

2.2.4. KTT Annapolis (2007)

Setelah kurang lebih 4 tahun rehat mengupayakan perdamaian antara Palestina dan Israel, pada tahun 2007, pemerintahan Bush yang berada di masa akhir jabatannya mengadakan sebuah KTT di Annapolis (Amerika Serikat) guna mencoba kembali usaha perdamaian konflik Palestina-Israel. Pada KTT Annapolis, pihak yang dilibatkan hampir sama dengan tahun 2003, yakni AS sebagai pemrakarsa; Kuartet; beberapa perwakilan negara Arab; delegasi Palestina yang dipimpin oleh Presiden PA Mahmoud Abbas; dan delegasi Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ehud Olmert. KTT ini menghasilkan komitmen bersama antara pihak Israel dan pihak Palestina untuk terlibat dalam negosiasi dengan tujuan kesepakatan damai penuh pada akhir tahun 2008 (BBC, 2013).

Ditengah-tengah proses negoisasi pada KTT Annapolis, keduanya terpaksa berhenti dan tidak melanjutkan prosesi perdamaian konflik akibat serangan militer Israel ke Gaza pada Desember 2008. Penyerangan tersebut bertepatan pada transisi masa pemerintahan Olmert dengan Benjamin Netanyahu.

2.2.5. Obama-led peace talks (2009 & 2013)

Sebelum pemerintahan Trump berkuasa, langkah perdamaian konflik Palestina-Israel dilaksanakan oleh pemerintahan Obama yang dihelat pada tahun 2009 dan 2013. Perhelatan agenda Obama terhadap upaya perdamaian konflik Palestina-Israel dilaksanakan di AS, topik utamanya adalah membicarakan pembekuan sebagian besar pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat Palestina. Namun dikarenakan tidak ada kesepakatan antar keduanya, upaya perbincangan menuju perdamaian konflik Palestina-Israel juga gagal (TRT World, 2019).

2.3. Tentang Kelompok Evangelis

Kelompok Evangelis ditujukan kepada sebagian kalangan individu yang menganut kepercayaan agama Kristen Protestan. Dalam bahasa Inggris, kelompok Evangelis kerap disebut sebagai '*Evangelical Christian*' – yang mana kata '*Evangelical*' diadopsi dari kata '*Eungalion*' yang berarti 'Kabar Baik' dalam bahasa Yunani. Sehingga pada definisi dasarnya, kelompok Evangelis mengacu pada kalangan individu, komunitas, atau gereja (denominasi) yang memiliki komitmen tinggi kepada substansi kabar baik di Al-Kitab bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia (Merritt, 2015a).

Namun terdapat beberapa definisi lain yang merepresentasikan "siapakah sosok kelompok Evangelis". Sejarawan David Bebbington mengidentifikasi karakter dari kelompok Evangelis yang mencakup: Memiliki pengalaman pertobatan "dilahirkan kembali"; Mempercayai bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan bentuk dari penebusan dosa umat manusia; Al-Kitab merupakan

otoritas spiritual tertinggi; dan Secara aktif menyebarkan kepercayaan Kristiani (gospel) melalui perbuatan-perbuatan baik. Tokoh Evangelis Kanada, Brian Stiller menyatakan bahwa kelompok Evangelis merupakan individu yang mendorong pergerakan pada kesetiaan Al-Kitab dan Yesus. Penulis buku *'Who is an Evangelical?: The History of a Movement in Crisis'*, Thomas Kidd, mencirikan kelompok Evangelis sebagai sosok *'Protestant born again'* yang menjunjung tinggi segala substansi Al-Kitab sebagai firman Tuhan dan menekankan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus (Butler, 2021; Miller, 2020; The Economist, 2021).

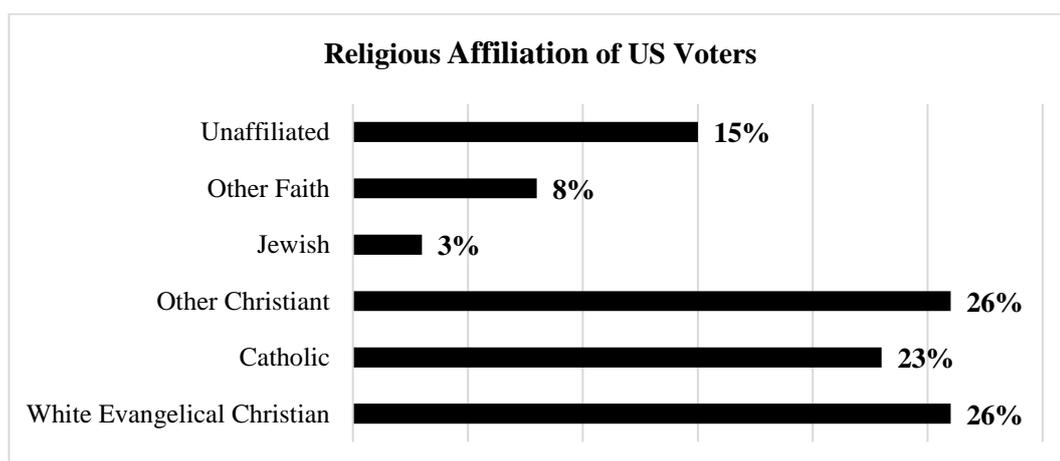
2.3.1. Kelompok Evangelis dan Politik di AS

Kelompok Evangelis merupakan representasi dari kelompok pergerakan kelompok akan umat Kristiani terbesar di dunia. Pada tahun 2016, populasi kelompok Evangelis mencapai 619 juta di seluruh dunia (Besmond de Senneville, 2016). Dalam jajak pendapat Gallup 2020, 34% responden Amerika mengklaim diri mereka sebagai bagian dari kelompok Evangelis. Diperkirakan bahwa populasi kelompok Evangelis di Amerika jumlahnya mencapai 111 juta individu, namun 1 dari 4 kalangan Evangelis yang disurvei oleh Gallup berasal dari golongan non-kulit putih.

Di Amerika, definisi 'Kelompok Evangelis' terbagi menjadi dua makna. Makna pertama berkaitan dengan teologi, mengacu pada individu Kristiani yang menjalankan agamanya dengan saksama beserta dengan mengadopsi ajaran-ajaran Al-Kitab kedalam kehidupan bermasyarakat. Mereka berasal dari berbagai kalangan latar belakang, ras, suku, dan antar golongan (Newport & Carroll, 2005). Makna kedua erat kaitannya dengan aspek politik, karakteristiknya sama persis

dengan makna teologi hanya saja lingkungannya di dominasi pada kalangan kulit putih, berkarakter konservatif, dan mayoritas berafiliasi terhadap partai politik Republik (Wilcox, 1990). Kalangan ini kerap disebut sebagai *American White Evangelical Christian*.

Tabel 2. 5 Data segmen pemilih masyarakat AS berdasarkan klasifikasi kepercayaan



Sumber: National Election Pool, (2016)

Agar tidak terjadinya kerancuan, maka makna ‘kelompok Evangelis’ dalam keseluruhan tulisan ini ditujukan pada kalangan *American White Evangelical Christian*. Kelompok Evangelis merupakan salah satu blok suara terbesar dalam percaturan perpolitikan domestik AS. Berdasarkan keterangan Gambar 2.5, pada tahun 2016 populasi mereka berjumlah 26% dari keseluruhan rakyat AS. Apabila dikalkulasikan secara matematis, maka populasi kelompok Evangelis berjumlah lebih dari 80 juta jiwa yang mayoritasnya tersebar di beberapa wilayah negara bagian yang memiliki kadar demografi cenderung rural, seperti Texas, Alabama, dan Missouri.

Besarnya populasi kelompok Evangelis di AS, turut membuat mereka memiliki pengaruh dalam mendorong sebuah kebijakan pemerintah, baik dalam lingkup domestik ataupun luar negeri. Contoh besar pengaruh mereka dalam mendorong kebijakan domestik adalah dengan diberlakukannya UU yang membatasi upaya Aborsi yang telah berlaku di 8 negara bagian AS, yang mana perjuangan eksistensi atas UU tersebut sebagian besar diinisiasi oleh kubu *Pro-Life* yang merupakan afiliasi dari kelompok Evangelis dan kelompok Katolik (BBC News, 2019; Wilcox & Gomez, 1990). Dari sisi kebijakan luar negeri AS, kelompok Evangelis merupakan salah satu komunitas yang mendorong pemerintahan AS untuk terus mengadvokasi kepentingan Israel di tengah konfliknya dengan Palestina. Alasan mendasar mengapa kelompok Evangelis pro-Israel terdapat kaitannya dengan ramalan Al-Kitab tentang peristiwa *Jesus Second Coming*.

Dalam konteks mengadvokasi kepentingan Israel, kelompok Evangelis memiliki dua saluran utama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan AS. Saluran pertama adalah melalui jaringan CUFI (*Christians United For Israel*). CUFI merupakan organisasi lobi pro-Israel terbesar di Amerika, jumlah anggotanya melebihi dari 10 juta orang. Tujuan utamanya adalah untuk mewadahi inter-entitas gereja (denominasi), individu, dan komunitas Evangelis di Amerika agar dapat mengumpulkan suara kepada pemerintah guna mendukung Israel. Dalam hal melobi kebijakan pro-Israel, CUFI lebih dominan berada di dalam arena Kongres (Posner, 2020; Salleh & Zakariya, 2012). Saluran lainnya melalui *Evangelical Advisory Board*, sebuah dewan penasihat informal kalangan Evangelis yang dibentuk khusus pada masa pemerintahan Trump. Dewan penasihat tersebut

didirikan oleh individu-individu yang berkecimpung di dunia Evangelis, mereka memiliki tugas bahwa memastikan suara kelompok Evangelis telah di dengar oleh pemerintahan eksekutif Trump.

2.4. Bentuk Kebijakan Pro-Israel Pemerintahan AS Era Kepresidenan Trump

Kebijakan luar negeri AS era kepresidenan Trump berkomitmen untuk mendamaikan konflik ‘sengketa tanah’ antara Palestina-Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Dibantu oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Jared Kushner serta tim terkait, Trump merumuskan berbagai kebijakan luar negeri AS dalam mengupayakan perdamaian Palestina-Israel dengan beberapa langkah, yakni meliputi :

2.4.1. Merilis Proposal Perdamaian *Deal of The Century*

Proposal *Deal of the Century* adalah bentuk dari rencana proposal perdamaian Israel-Palestina yang dirilis serta di inisiasi oleh pemerintah AS era kepresidenan Donald John Trump pada Januari tahun 2020 silam. Aktor yang terlibat di balik layar penyusunan proposal damai Deal of The Century meliputi penasihat politik Presiden yang sekaligus menantu Trump, Jared Kushner; Dubes AS untuk Israel, David Friedman; Pengacara Jason Greenblatt (Musthafa Abd Rahman, 2019). Ketiga sosok politisi AS tersebut mengusung visi untuk mengadvokasi perdamaian konflik Palestina-Israel berdasarkan pendekatan transaksi melalui substansi proposal yang diajukan.

Poin penting dari substansi proposal damai versi Trump adalah untuk menolak keras mengenai eksistensi dari *two state solution*. Artinya, kedaulatan teritori wilayah Yerusalem dan 30% dari teritori Tepi Barat dibawah kontrol pemerintah Israel. Lebih lanjut, substansi dari proposal ini mengindikasikan bahwa Palestina tidak diperkenankan untuk memiliki sumber daya kekuatan militer; menguasai akses teritorial udara; dan menjalin kesepakatan dengan dunia internasional (Mushafa Abd Rahman, 2020). Namun di samping kerugian yang di dapat Palestina, AS menawarkan alokasi investasi dana sebesar US\$ 50 miliar, serta mengakui secara de jure kedaulatan penuh Palestina terhadap teritori Gurun Nagev dan pemindahan lokasi Ibu Kota dari Yerusalem Timur menuju Abu Dis.



Gambar 2. 4 Rencana usulan Trump mengenai pembagian Teritori Palestina-Israel yang termaktub di dalam Proposal Deal of The Century

Sumber: Kompas.id, (2020)

2.4.2. Menggagas Pembentukan Abraham Accord

Setelah merilis proposal *'Deal of The Century'* di awal tahun 2020. Selanjutnya, Trump berambisi untuk menggagas pembentukan koalisi antar negara-negara mayoritas muslim agar melakukan normalisasi hubungan terhadap Israel. Koalisi tersebut kerap dikenal dengan nama *Abraham Accord*. Sebutan 'Abraham' terinspirasi dari kisah sosok tokoh Abraham (Nabi Ibrahim A.S dalam ajaran Islam) yang memberikan keturunan bagi masyarakat umat Yahudi serta umat Islam sekaligus.

Upaya pembentukan Abraham Accord dimulai ketika Secretary of State (Menteri Luar Negeri AS) Mike Pompeo melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara mayoritas muslim pada Agustus 2020 silam. Kunjungan diplomatik Pompeo ditujukan guna mendorong serta mempromosikan agar negara-negara mayoritas muslim bersedia melakukan normalisasi dengan Israel. Dengan kata lain, Menlu Pompeo sebagai representatif pemerintah AS berperan sebagai pihak ketiga dalam memfasilitasi normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel (Muhammad, 2020).

Konsep yang ditawarkan AS kepada negara-negara mayoritas muslim dalam menegosiasikan kesediaannya bergabung ke dalam Abraham Accord adalah dengan mengadopsi pendekatan berbasis transaksionalis atau *win-win solution*. Artinya, AS akan memberikan imbalan berupa benefit-benefit tertentu yang bisa menjadi suatu keuntungan dalam memenuhi kepentingan nasional negara bersangkutan yang melakukan normalisasi dengan pihak Israel.

Dengan adanya eksistensi dari *Abraham Accord*, turut memecah perspektif negara-negara mayoritas muslim dalam menghadapi persoalan isu konflik Palestina-Israel menjadi dua kubu. Perspektif kubu pertama menyatakan bahwa pembukaan hubungan normalisasi diplomatik dengan Israel hanya akan terjadi dengan syarat pemberian kembali teritorial resmi Palestina sebelum terjadinya kependudukan militer tahun 1967. Perspektif kedua meyakini bahwa solusi yang tepat bagi perdamaian konflik Palestina-Israel adalah dengan membuka hubungan normalisasi dengan Israel terlebih dahulu, lantas demikian baru berusaha untuk melobi Israel atas kesediaannya dalam mencapai solusi politik yang adil atas isu Palestina.

Hingga sekarang, terdapat setidaknya empat negara mayoritas muslim sekaligus anggota dari OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang telah menyetujui untuk turut bergabung kedalam *Abraham Accord*. Keempat negara tersebut meliputi Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Dokumen kesepakatan yang termaktub di dalam *Abraham Accord* turut mengikutsertakan komitmen mengenai penyelesaian konflik Palestina-Israel secara adil, menyeluruh, dan Abadi (Mada, 2020).

2.5. Kesimpulan

AS dan Israel merupakan dua negara yang memiliki jalinan yang spesial antara satu sama lainnya. Hubungan tersebut dimulai pada masa tahun 1917 dengan mendukung Deklarasi Balfour – suatu deklarasi yang menjadi cikal bakal justifikasi pembentukan negara Israel di Palestina. Hubungan AS-Israel semakin erat manakala Israel teguh mengimplementasikan demokrasi diantara gempuran pengaruh komunisme Uni-Soviet semasa perang dingin di Timur Tengah, hingga menyepakati kerjasama bilateral guna menyukseskan agenda GWOT pasca perang dingin. Dalam rangka membuktikan kedekatan antara kedua negara, AS merupakan negara pengirim *foreign aid* ke Israel dengan angka yang cenderung konsisten sebesar AS\$ 3 Miliar sejak tahun 2015.

Kedekatan latar belakang AS-Israel juga berasal dari pengaruh kondisi domestik AS, terutama spektrum opini publik dan lobi. Pada dasarnya, mayoritas publik Amerika berpihak pada Israel selama di tengah konflik Palestina-Israel. Hal ini dibuktikan dengan angka survey yang selalu menunjukkan angka lebih dari 50% sejak tahun 1980an. Tidak sampai disitu, pihak pelobi juga memiliki andil yang besar dalam konteks mempengaruhi kiprah kebijakan pemerintah terhadap isu Israel. Walaupun dekat dengan Israel, namun dilain sisi, pemerintahan AS juga berusaha mendamaikan konflik Israel dengan Palestina. Sebelum masa pemerintahan Trump, catatan sejarah menyatakan bahwa AS telah melaksanakan lima momen kunci terkait upaya perdamaian Palestina-Israel yang terdiri dari: Oslo I & Oslo II; KTT Camp David; Quartet; Annapolis; Obama-led peace talks. Saat

pemerintahan Trump, terdapat dua kebijakan yang berupaya mendamaikan konflik Palestina-Israel yakni *Abraham Accord* dan *Deal of The Century*.

Terkait dengan mayoritas dukungan publik Amerika terhadap Israel, kelompok Evangelis memiliki andil yang paling besar terhadap isu dukungan Israel. Hal ini dikarenakan kelompok Evangelis merupakan blok suara terbesar sekaligus entitas mayoritas di tengah publik Amerika. Selama pemerintahan Trump, mereka memiliki dua saluran yang memiliki pengaruh besar guna membawa suatu pamor terhadap kebijakan luar negeri, yakni CUFI dan *National Evangelical Advisory Board*